

SEBARAN MASYARAKAT MISKIN DAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI RUMAH TANGGA SASARAN DI KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK - JAWA BARAT

Habibullah

ABSTRACT

Bantuan Langsung Tunai (BLT: Unconditional cash transfer) One of the poverty reduction program with controversial. Controversial because this program provides assistance in the form of cash which raised the common sense that these programs make people lazy and this Program is carried out not on target. This study aims to map the distribution of the poor based on the BLT recipients database and processed using GIS software ArcView version 3.3. Besides, this study also identified the BLT program benefits to households in targeted (rumah tangga sasaran) in Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. This descriptive research with quantitative approach.

Results showed Kelurahan Pancoran Mas is a slum area with indicator is a urban village with the most program recipients BLT program and with very poor category have the most in this urban village. When viewed from the benefit program for households, BLT program benefits to meet basic needs for poorest but the poor and near-poor category of the BLT program is a right as a citizen to obtain compensation for fuel price hike. Therefore, the poverty reduction policy should refer to the categorization of poverty: poorest, poor and near poor. For the poorest category, the social assistance programs such as the BLT program is necessary but for the poor and near-poor category of the most appropriate program is a program of community empowerment.

Keywords: Social Policy, Poverty Mapping, Unconditional Cash Transfer

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat terpisahkan dari hadirnya persoalan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan adalah masalah sosial yang paling dikenal orang. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial. Kemiskinan mempengaruhi masalah sosial lainnya dan sebaliknya (Edi Soeharto, 2008).

Pada Konteks Pembangunan Indonesia, pembangunan nasional dimulai pada tahun 1970 an, isu yang diangkat adalah membangun ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera. Pada umumnya

pemikiran tentang pembangunan di negara-negara belum berkembang (*under development*) selalu meletakkan kemiskinan sebagai isu sentralnya. Berbagai program penanggulangan telah banyak dilaksanakan khususnya oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, baik dalam skala nasional maupun lokal seperti: program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program/Proyek Bantuan Kesejahteraan Sosial (BKS), Program Kesejahteraan Sosial KUBE (Prokessos KUBE), Program Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM), dan lain-lainnya. Dari berbagai program tersebut ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin menurut BPS sepuluh tahun terakhir (1996-2008) rata-rata 18,39%. Lihat Tabel.1

Tabel 1 :
Angka Kemiskinan (1996 - 2008)

Prosentase Penduduk Miskin (%) (dibawah garis kemiskinan)			
TAHUN	KOTA	DESA	KOTA + DESA
1996	13,39	19,78	17,47
1997	**	**	**
1998	21,92	25,72	24,23
1999	19,41	26,03	23,43
2000	14,60	22,38	19,14
2001	9,76	24,84	18,41
2002	14,46	21,10	18,20
2003	13,57	20,23	17,42
2004	12,13	20,11	16,66
2005	11,68	19,98	15,97
2006	13,47	21,81	17,75
2007	12,52	20,37	16,58
2008	11,65	18,93	15,42
Rata - Rata	14,05	21,77	18,39

Sumber : Kemiskinan BPS diolah dari Data Susenas terbitan.

** : Data kemiskinan tahun 1997 tidak di ketemukandi Susenas.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang mengandung kontroversial dan sempat mengundang penolakan dari berbagai pihak mulai dari kepala daerah kabupaten/kota, sampai dengan ketua Rukun Tetangga (RT). Hal seperti diungkapkan oleh Ketua Umum Persatuan Kepala dan Perangkat Desa Nusantara Sudir Santoso menilai bahwa BLT yang diberikan pemerintah tidak mendidik masyarakat, bantuan tersebut akan merusak pranata sosial yang ada di pedesaan (koran tempo, 19 mei 2008). Para politisi berpendapat BLT bukan merupakan kebijakan yang efektif seperti yang diungkapkan oleh aktivis PDI Perjuangan Arifin Panigoro yang menyatakan bahwa BLT bukan keputusan yang bijak yang dibutuhkan adalah pekerjaan bukan uang yang langsung habis ketika diberi sedangkan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Prabowo Subianto menyatakan BLT bukan kebijakan yang efektif lebih baik program padat karya dengan mengurangi subsidi pada orang kaya dan memberi bantuan pada rakyat miskin (koran tempo, 19 mei 2008). Hal senada juga diungkapkan oleh Siswanti (2008) yang melakukan penelitian dinamika implementasi Program BLT di KabupatenKebumen menyatakan bahwa ada pemahaman yang berbeda antar beberapa lapisan birokrat atau aktor implementasi program BLT

menimbulkan implikasi berupa konflik antar aktor pelaku kebijakan dan didominasi dengan adanya krisis kepercayaan terhadap kinerja BPS. Selain itu terdapat pula temuan-temuan praktek penyimpangan dalam implementasi BLT. Implikasi yang lainnya adalah munculnya *moral hazard* kelompok non miskin dengan perilaku yang menyatakan dirinya miskin dengan mendaftarkan diri supaya bisa memperoleh dana bantuan tersebut.

Berbeda dengan pendapat Siswanti berdasarkan Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan langsung tunai tahun ini lebih baik dibandingkan dengan 2005 tidak ada penyelewengan dalam penyaluranBLT(22September2008,www.vivanews.com).

Secara keseluruhan penyaluran BLT oleh PT Pos ini sangat baik dan lancar. Sesuai hasil audit BPKP di 228 Kab/Kota, 878 Kecamatan dan 2.644 Desa/Kelurahan yang dilaksanakan serentak oleh 25 Kantor Perwakilan BPKP seluruh Indonesia, dihasilkan pencapaian pelaksanaan BLT-RTS tahun 2008 meliputi: ketepatan pendataan(86,16%),ketepatan penetapan(91,74%),ketepatan jumlah dana yang diterima RTS (97%),ketepatan waktu distribusi KKB (87,83%),ketepatan waktu penyaluran BLT (90,34%) dan pemanfaatan dana BLT oleh RTS (93,86%) (www.setneg.go.id)

Sementara itu di Kota Depok terdapat 23.610 Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLT yang tersebar di 6 kecamatan, di kecamatan Pancoran Mas terdapat 6.739 RTS. Salah satu isue yang menonjol di kota Depok adalah kelemahan pelaksanaan program BLT ini yaitu ketidaktepatan penentuan sasaran penerima BLT dan manfaat program BLT tersebut bagi masyarakat miskin. Ketidaktepatan penentuan sasaran dan penerima BLT disebabkan oleh kurangnya akurasi data oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pemetaan sebaran penerima BLT dan manfaat program BLT terhadap masyarakat miskin di kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

B. Permasalahan

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Depsos RI bahwa jumlah penerima BLT di Kecamatan Pancoran Mas adalah 6.739 rumah tangga sasaran yang tersebar di 11 kelurahan. Meskipun sudah ada data by

name by address penerima BLT yang bisa dijadikan database penduduk miskin di kecamatan Pancoran Mas. Namun data tersebut belum diolah sehingga sangat menyulitkan pengambil kebijakan untuk melihat sebaran penerima BLT berdasarkan kelurahan dan kategori kemiskinan. Dengan demikian belum terlihat kelurahan mana yang merupakan kantong kemiskinan dan bagaimana sebaran penerima BLT berdasarkan kategori kemiskinan.

Hal yang menjadi sorotan publik terhadap program BLT adalah ketepatan sasaran penerima BLT dan Manfaat BLT tersebut bagi rumah tangga sasaran. Kajian ini juga memverifikasi data penerima BLT di lapangan dengan manfaat program BLT tersebut bagi masyarakat miskin Kec. Pancoran Mas Kota Depok.

Dari permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaran masyarakat miskin berdasarkan penerima Program BLT di Kec. Pancoran Mas Kota Depok?
2. Bagaimana manfaat Program BLT bagi Rumah Tangga Sasaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya peta sebaran masyarakat miskin berdasarkan penerima BLT Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan diketahuinya manfaat Program BLT bagi Rumah Tangga Sasaran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan basis data untuk pemilihan prioritas program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya di kecamatan Pancoran Mas Kota Depok

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pemetaan Kemiskinan

Sebagai bagian dari rancangan program untuk mengidentifikasi kelompok sasaran, upaya pemetaan kemiskinanpun mulai dikembangkan di Indonesia. Secara khusus Program IDT dan Program Takesra/Kukesra memulai dua upaya utama pemetaan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil. Program IDT berlangsung dari 1994 hingga 1997. Pendekatan penetapan sasaran yang dipakai dalam program IDT adalah dengan mengklasifikasi seluruh desa di

Indonesia kedalam desa miskin atau desa tertinggal dan bukan desa miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program IDT lebih mengarah pada daerah miskin dan bukan penduduk miskin. Berdasarkan Podes 1993, BPS menetapkan bahwa 20.622 desa, atau 31% dari seluruh desa di Indonesia, tergolong dalam desa miskin atau desa tertinggal. Dari seluruh desa miskin ini, 19.615 di antaranya berada di wilayah perdesaan dan 1.007 berada dipertanian. Sementara itu, Program Takesra/Kukesra yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencoba untuk menetapkan sasaran rumah tangga miskin secara langsung. BKKBN mengklasifikasi rumah tangga di Indonesia ke dalam lima kategori kesejahteraan: (i) Keluarga Pra Sejahtera atau KPS, (ii) Keluarga Sejahtera I atau KS I, (iii) KS II, (iv) KS III, dan (v) KS III+ (BKKBN 1994). Rumah tangga miskin sering disejajarkan dengan KPS, namun kadang-kadang batasannya meliputi KPS dan KS I.

Sementara itu, data kemiskinan yang tersedia masih bersifat makro (jumlah penduduk miskin dalam agregasi nasional, provinsi dan kabupaten/kota). Dalam konteks program BLT maka diperlukan data untuk target sasaran secara langsung yang lebih mikro yaitu tentang nama dan alamat Rumah Tangga (RT) miskin. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan RT miskin, maka digunakan konsep kemiskinan yang terkait dengan kemampuan seseorang/RT memenuhi kebutuhan dasar untuk makanan dan non-makanan. Seseorang/RT dikatakan miskin, bila kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Batas kebutuhan dasar, minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan dan disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun, RT memiliki jumlah anggota rata-rata empat orang. RT miskin dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: 1) Sangat Miskin, apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu hanya mampu memenuhi konsumsi makanan mencapai 1.900 kalori per orang perhari, plus kebutuhan dasar non-makanan atau setara Rp480 ribu per RT per bulan. 2). Miskin, apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu hanya mampu memenuhi konsumsi makanan antara 1.900-2.100 kalori per orang

per hari, plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.600 ribu per RT per bulan, di atas Rp.480 ribu. 3). Mendekati/hampir Miskin, apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu hanya mampu memenuhi konsumsi makanan antara 2.100-2.300 kalori per orang per hari, plus kebutuhan dasar non makanan atau setara Rp.700 ribu per RT per bulan, di atas Rp 600 Ribu. RT yang memenuhi kriteria inilah yang nantinya berhak memperoleh dana BLT, yang sebelumnya menerima KKB.

B. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan terdapat empat(4) kategori kebijakan yang diselenggarakan secara terpadu yakni: 1) kebijakan perluasan kesempatan (*promoting opportunity*) berkaitan dengan penciptaan iklim dan lingkungan yang kondusif dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 2) Kebijakan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) berkaitan dengan upaya penguatan masyarakat beserta organisasi dan kelembagaannya untuk mampu mengakses dan terlibat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan publik. 3). Kebijakan peningkatan kemampuan(*capacity building*) berkaitan dengan upaya peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan 4). Kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial yang diarahkan melalui kemampuan kelompok masyarakat dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan melalui mekanisme tabungan kelompok (Gunawan Sumodiningrat, 2007).

Menurut Harry Hikmat perlindungan sosial merupakan kewajiban negara untuk penyediaan pelayanan sosial dasar dan menjadi tanggung sosial masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dasar dapat berupa subsidi dan jaminan sosial. Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu kompensasi yang diberikan pemerintah pada saat

terjadi kenaikan harga dasar Bahan Bakar Minyak (<http://kfm.depsos.go.id/>).

C. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada saat pemerintah menaikkan harga dasar BBM, kenaikan harga dapat mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin dapat mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun, karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Warga masyarakat miskin akan terkena dampak sosial semakin menurun taraf kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (*social safety net*), seiring dengan besarnya beban subsidi BBM semakin berat dan resiko terjadinya defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, akibat selisih harga BBM dalam negeri dibanding dengan luar negeri berakibat memberi peluang peningkatan upaya penyelundupan BBM keluar negeri. Pemerintah memandang perlu merevisi kebijakan tentang subsidi BBM, sehingga subsidi yang selama ini dinikmati juga oleh golongan masyarakat mampu dialihkan untuk golongan masyarakat miskin.

Pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah melaksanakan skema Program Kompensasi Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Pada Tahun 2008 Pemerintah melanjutkan skema program PKPS BBM dari bulan Juni s/d Desember 2008 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (*unconditional cash transfer*) sebesar Rp.100.000,- perbulan selama 7 bulan, dengan rincian diberikan Rp.300.000,- /3 bln (Juni-Agustus) dan Rp.400.000,- /4 bln (September-Desember). Rumah Tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah :1). Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

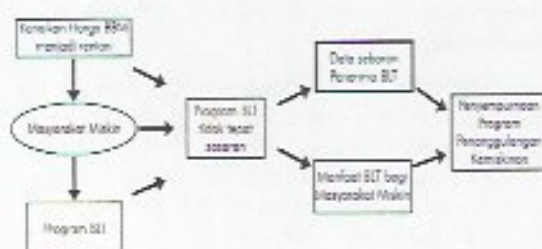
- 2). Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- 3). Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS, yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia (Depsos, 2008).

D. Kerangka kerja (framework)

Masyarakat miskin menjadi rentan ketika terjadi kenaikan harga BBM oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Namun dalam pelaksanaannya berkembang ketidakpuasan berbagai elemen masyarakat menyangkut ketepatan penerima sasaran, mekanisme penyaluran dan manfaat BLT itu sendiri bagi masyarakat miskin.

Diagram 2.
Kerangka Pikir



Oleh karena itu diperlukan analisis sebaran penerima BLT dengan menggunakan sistem informasi geografis dan Manfaat BLT bagi masyarakat miskin. Diharapkan dari kajian ini diperoleh informasi sebaran penerima BLT dan manfaat BLT itu sendiri bagi masyarakat miskin dalam rangka penyempurnaan program penganggulangan kemiskinan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk memetakan sebaran masyarakat miskin di Kec. Pancoran Mas

berdasarkan data penerima Program BLT dari Pusdatin Kesos Depsos RI dengan menggunakan software ArcView GIS versi 3.3 serta didukung oleh data-data kualitatif terutama mengenai manfaat Program BLT. Penentuan lokasi penelitian secara purposive di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat dengan pertimbangan, bahwa kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan penerima Program BLT terbanyak di Kota Depok.

Sumber data penelitian, yaitu: 1). Data-base Penerima Program BLT *by name by address* yang dimiliki Pusdatin Kesos Depsos RI. 2) Masyarakat Penerima Program BLT. 3) Masyarakat bukan Penerima BLT. 4) Tokoh masyarakat setempat. Unit analisis dari penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Pancoran Mas yang mengetahui Program BLT. Teknik penarikan sampel dilakukan secara purposive yaitu sampel ditentukan dengan maksud tujuan tertentu oleh karena maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: 1). Masyarakat penerima BLT tahun 2009 dengan kategori hampir miskin, miskin dan sangat miskin sebanyak 6 orang. 2). Masyarakat bukan penerima BLT tapi mengetahui program BLT sebanyak 3 orang. 3). Tokoh masyarakat yaitu ketua RW dan Ketua RT sebanyak 3 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi interview mendalam dan studi dokumen tasi. Sedangkan pengamatan untuk melengkapi unit analisis tersebut dilakukan terhadap kondisi wilayah dan kondisi rumah tangga sasaran.

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu kecamatan di kota Depok. Terdiri dari 11 kelurahan yaitu: Bojong Pondok Terong, Cipayung, Cipayung Jaya, Depok, Depok Jaya, Mampang, Pancoran Mas, Pondok Jaya, Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru dan Ratuja-ya dengan luas wilayah 3,437 ha. Sebagian besar peruntukan lahannya digunakan untuk perumahan. Hal ini dikarenakan kota Depok merupakan salah satu penyangga ibukota negara dan sarana transportasi kereta api merupakan sarana transportasi yang cepat dan murah bagi sebagian besar warga jabotabek.

Peta 1.
Stasiun Kereta Api di Kec. Pancoran Mas



Sumber :
Olah data menggunakan arcvew, 2009

Peta 2.

Sebaran Penduduk Kec. Pancoran Mas Tahun 2008



Sumber :
1). Olah data menggunakan arcvew.
2). Pancoran Mas dalam angka 2008,2009.

Di kecamatan Pancoran Mas terdapat 3 (tiga) stasiun kereta api yaitu stasiun Depok, Depok lama dan Citayam sehingga dengan posisi strategis ini menyebabkan penggunaan lahan banyak digunakan untuk perumahan. Selain untuk perumahan, masih terdapat pemanfaatan lahan untuk sawah yang terbesar di kelurahan Cipayang dan pemanfaatan untuk hutan negara di kelurahan Pancoran Mas dan Pondok Jaya.

Posisi strategis kecamatan Pancoran Mas berakibat padatnya penduduk. Penduduk kecamatan 247,077 jiwa dengan kepadatan 71.90 jiwa/km². Kelurahan Depok Jaya merupakan kelurahan terpadat 193.50 jiwa/km² dan kelurahan Pancoran Mas merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 41,259 jiwa. Sebagian besar penduduk kec. Pancoran Mas bekerja pada sektor industri dan perdagangan. Tempat bekerja masyarakat kecamatan Pancoran Mas tidak hanya sebatas di wilayah kecamatan Pancoran Mas saja akan tetapi juga

di wilayah lain seperti di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kecamatan Pancoran Mas berpendidikan SLTA meskipun demikian masih ditemukan masyarakat yang tidak menamatkan SD sebanyak 15,440 jiwa dan hampir separuhnya berada di kelurahan Pancoran Mas. Apabila dilihat dari mobilitas penduduk ternyata di kecamatan Pancoran Mas mobilitasnya tinggi dan penduduk masuk ke wilayah kecamatan Pancoran lebih besar dibanding dengan penduduk keluar yaitu sebanyak 1,140 jiwa yang masuk dan 548 jiwa yang meninggalkan kecamatan Pancoran Mas.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Sebaran Penerima BLT di Kecamatan Pancoran Mas

Di kecamatan Pancoran Mas terdapat 6.739 Rumah Tangga Sasaran penerima BLT yang tersebar di 11 kelurahan. Peta 3. menunjukkan sebaran penerima BLT di kecamatan Pancoran Mas, tampak bahwa penerima BLT terbanyak di kelurahan Pancoran Mas. Hal ini disebabkan dari tingkat kepadatan penduduk kelurahan ini merupakan kelurahan terpadat dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam.

Peta 3.

Sebaran Penerima Program BLT di Kec. Pancoran Mas



Sumber :
1). Olah data menggunakan arcvew.
2). Database BLT Pusdatin DepsosRI 2009.

Peta 4

Perbandingan Jumlah Penduduk & Penerima BLT di Kec Pancoran Mas Tahun 2009



Sumber :

- 1)olah data menggunakan arcview.
- 2). Database BLT Pusdatin Depsos RI. 3)Pancoran Mas Dalam Angka 2008, 2009.

Meskipun kelurahan Pancoran Mas merupakan kelurahan yang paling banyak penerima BLT (17,37% penerima BLT di kecamatan Pancoran Mas bertempat tinggal di kelurahan Pancoran Mas) namun apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan penerima BLT maka kelurahan Rangkapan Jaya (lihat peta 4) merupakan kelurahan yang mempunyai prosentase tertinggi yaitu sebesar 3,78% sedangkan prosentase terendah perbandingan antara penerima BLT dengan penduduk adalah kelurahan Depok Jaya (0,32%).

Besarnya prosentase perbandingan antara penerima BLT dengan penduduk di kelurahan Rangkapan Jaya disebabkan : 1) Akurasi data, mobilitas penduduk di kelurahan ini tidak terlalu tinggi sehingga pimpinan satuan lingkungan setempat mudah dalam melakukan pendataan calon penerima BLT. Apabila dibandingkan dengan kelurahan Pancoran Mas yang tingkat mobilitas penduduknya tinggi kadangkala pengurus RT tidak mengenal warganya karena status kewargaannya cuma ngontrak dan tidak permanen dan bahkan ada warga yang tidak melapor keberadaannya pada pengurus RT setempat. 2) Kantong kemiskinan, apabila data penerima BLT tersebut memang akurat maka kemungkinan besar kelurahan tersebut memang kantong daerah miskin.

Apabila dilihat dari kategori kemiskinan maka sebagian besar penerima BLT adalah masyarakat yang masuk kategori miskin dan

kategori hampir miskin. Pada peta 5. terlihat masyarakat dengan kategori hampir miskin yang menerima BLT di kelurahan Rangkapan Jaya dan Depok. Di kelurahan Rangkapan Jaya dari 952 RTS terdapat 332 RTS dengan Kategori hampir miskin sedangkan di kelurahan Depok dari 867 RTS terdapat 337 RTS dengan kategori hampir miskin (34,87%).

Sedangkan apabila dilihat dari sebaran penduduk sangat miskin maka kelurahan Pancoran Mas merupakan kelurahan dengan penduduk sangat miskin terbanyak dari 1.175 RTS penerima BLT terdapat 153 RTS dengan kategori sangat miskin sedangkan kelurahan Depok mempunyai penduduk sangat miskin paling sedikit dari 70 RTS penerima BLT hanya terdapat 5 RTS sangat miskin.

Peta 5.

Perbandingan Jumlah Penduduk & Penerima BLT di Kec Pancoran Mas Tahun 2009



Sumber :

- 1). Olah data menggunakan arcview.
- 2).Database BLT Pusdatin Depsos RI.

Peta 6.

Sebaran Penerima BLT Di Kec. Pancoran Mas Berdasarkan Kategori Sangat Miskin



Sumber :

- 1). Olah data menggunakan arcview.
- 2).Database BLT Pusdatin Depsos RI.
- 3). Pancoran Mas Dalam Angka 2008, 2009.

Penerima BLT di kecamatan Pancoran Mas sebagian besar termasuk kategori miskin (67,57%). Kelurahan Pancoran mas mempunyai jumlah penerima BLT terbanyak (17,37% dari keseluruhan penerima BLT di Kecamatan Pancoran Mas). Hal ini disebabkan dari segi jumlah penduduk kelurahan Pancoran Mas merupakan kelurahan terpadat di kecamatan Pancoran Mas. Letak strategis kelurahan Pancoran Mas yang dekat stasiun kereta api merupakan daya tarik pendatang untuk menetap dan berusaha di kelurahan ini. Berbagai sektor informal yang digeluti masyarakat kelurahan Pancoran Mas yang berkaitan dengan adanya stasiun kereta adalah pedagang gorengan, bakso, mie ayam, koran, balon maupun jadi pengamen dan pengemis di kereta.

Apabila dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk (25.173 Jiwa) dan jumlah rumah tangga (6.219 rumah tangga) dengan penerima BLT (952 RTS) maka kelurahan Rangkapan Jaya merupakan kelurahan yang mempunyai prosentase terbesar (3,78% dari jumlah penduduk dan 15,30% dari jumlah rumah tangga) penerima BLT. Kelurahan Pancoran Mas meskipun jumlah penduduknya (41.259 Jiwa) dan jumlah penerima BLT (1.175 RTS) terbanyak akan tetapi apabila dilihat dari perbandingan antara jumlah penerima dan penduduk relatif kecil (2,85%) disebabkan tingkat mobilitas penduduk di kelurahan ini tinggi sehingga meskipun sebenarnya termasuk kategori penerima BLT namun akibat penduduk sering berpindah-pindah kontrakan akhirnya tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

Apabila dilihat dari kategori kemiskinan maka kelurahan Pancoran Mas merupakan kelurahan paling banyak penerima BLT dengan kategori sangat miskin, 34% penerima BLT dengan kategori sangat miskin di Kecamatan Pancoran Mas berada di Kelurahan Pancoran Mas. Kelurahan Depok merupakan kelurahan paling banyak penerima BLT dengan kategori hampir miskin, 21% penerima BLT dengan kategori hampir miskin di Kecamatan Pancoran Mas terdapat di kelurahan ini. Dengan demikian bahwa kelurahan Pancoran Mas merupakan kelurahan yang permasalahan kemiskinan cukup kompleks sedangkan kelurahan Rangkapan Jaya akurasi data penerima BLT diragukan karena apabila dilihat dari perbandingan antara penduduk dengan penerima BLT prosentase paling tinggi dengan kategori hampir miskin juga paling tinggi.

B. Manfaat Program BLT bagi Masyarakat Miskin

Ada yang berpendapat (DFID, 2005) bahwa Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran bersifat *charity* dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-minta belas kasihan Pemerintah serta secara ekonomi mikro menumbuhkan budaya konsumtif sesaat, karena penggunaan uang tidak diarahkan oleh Pemerintah (*unconditional cash transfer*). Pendapat tersebut patut menjadi perhatian semua pihak, karena menghadapi masyarakat miskin selakanya tidak dengan program yang sifatnya *hit and run*, harus dengan program yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan mendorong mereka untuk mendayagunakan potensi dan sumber yang dimilikinya (*empowering*).

Namun pada sisi lain Pemerintah juga berkewajiban memberikan perlindungan sosial (*social protection*) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian harga BBM atau dalam keadaan adanya kebijakan/program penyesuaian secara struktural akan mempengaruhi masyarakat luas (*Structural Adjustment Program/ SAPs*). Karena itu program BLT-RTS dalam rangka PKPS BBM diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) melalui asistensi sosial (*social assistance*). Apalagi semua paham bahwa mekanisme subsidi BBM sebelumnya lebih banyak dinikmati masyarakat yang mampu (Depsos, 2008). Program semacam ini di berbagai negara juga dilaksanakan, dalam bentuk yang beragam, seperti pemberian *discount* harga, pemberian *voucher* (kupon) tabungan dan bantuan langsung tunai

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga kecamatan Pancoran Mas menyatakan bahwa BLT bermanfaat bagi mereka. Seperti yang dinyatakan informan penerima BLT di Kec Pancoran Mas:

" Yang bilang BLT tidak bermanfaat dan bikin malas itu para politisi mas, bagi kami warga miskin BLT sangat bermanfaat untuk nambah beli beras terutama ketika barang-barang kebutuhan pada naik" (Mrym, 11 des 2009)

Menurut Mrym (40 tahun) salah satu penerima BLT dengan kategori sangat miskin. Akibat perceraian dengan suaminya Mrym harus

menghidupi 2 orang anaknya, salah satunya adalah penderita gizi buruk. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Mrym bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan Rp. 10.000,-. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk membeli kebutuhan makanan. Uang BLT yang diterimanya pada bulan juli 2009 kemarin digunakan untuk membeli beras dan sekarang tetap bekerja sebagai buruh cuci.

Hal ini senada dengan Pjo (35 tahun) informan penerima BLT yang masuk kategori hampir miskin :

" Masak sich mas BLT bikin malas, kalo uangnya cuma Rp. 200.000 cukup untuk bayar hutang selebihnya kami harus usaha sendiri tapi yang jelas ini baru bentuk perhatian pemerintah dulu sich banyak program pemerintah yang kami juga harus kerja dulu seperti bangun selokan air tapi kami curiga mas pada pimpinan proyek tersebut upah yang kami terima udah dipotongnya kalo BLT kata pemerintah Rp. 200.000,- yach kami terima Rp. 200.000,-" (Pjo, 12 Des 2009)

Bagi Pjo, BLT merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat miskin. Program Bantuan Langsung Tunai merupakan program pemerintah yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin dan lebih transparan. Aparat pemerintah tidak berani memotong ataupun *mark up* dana tersebut karena masyarakat sendiri tahu jumlah uang yang diberikan. Namun apabila diamati dengan kondisi sosial ekonominya Pjo jauh lebih beruntung dibanding Mrym. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pjo mempunyai kios yang digunakan untuk berjualan kebutuhan sehari-hari di stasiun Depok lama. Dari hasil usaha dagangnya tersebut Pjo paling tidak sehari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-. Jk (37 tahun) berpendapat beda tentang BLT:

" BLT bermanfaat sekali mas bagi warga miskin, namun sayangnya tidak semua warga miskin di sini menerima dengan alasan bukan warga tetap dan tidak melapor ke RT ketika datang ke sini maka tidak terdaftar sebagai penerima BLT, maktum di sini banyak warga yang ngontrak mas tapi ada juga lho berhubung dia masih keluarga pak RT sebenarnya dia mampu, rumah milik sendiri, usaha dagang cukup sukses justru mendapat BLT " (Jk, 11 Des 2009)

JK yang bekerja sehari-hari jualan koran di stasiun Depok Lama, dengan profesi tersebut paling besar penghasilan Rp. 25.000,-/hari. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan di tabung untuk membayar kontrakan yang di sewanya sebesar Rp. 350.000,-/bulan dan termasuk kategori sangat miskin namun tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

Apabila dilihat dari ketepatan sasaran penerima BLT Mrym dan Pjo sudah tepat sasaran karena pada program yang berhak menerima BLT adalah rumah tangga yang termasuk kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin dan tidak ada perbedaan jumlah uang yang diterima. Bagi Mrym yang bekerja sebagai buruh cuci, uang tersebut cukup berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya namun tidak demikian untuk Pjo, uang tersebut dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat miskin. Hal ini berbeda dengan Jk meskipun termasuk kategori sangat miskin karena namanya tidak terdaftar sebagai penerima BLT maka dia tidak mendapatkan BLT.

Program BLT merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang dapat berupa bantuan uang tunai, barang (*in-kind*) ataupun kupon (*vouchers*). Intervensi bantuan uang tunai dipandang lebih baik daripada alternatif lain dari program pengentasan kemiskinan seperti pemberian barang (*in-kind transfer*), pemberian voucher, atau perbaikan sisi penawaran layanan publik (DFID 2005).

In-kind transfer, dimana pemerintah menyalurkan barang kebutuhan kelompok masyarakat miskin secara massal, menghambat perkembangan sektor usaha, sedemikian sehingga hanya menguntungkan bagi sektor usaha yang memproduksi sekelompok barang yang telah ditetapkan pemerintah. Penetapan jenis dan spesifikasi barang itu sendiri akan menjadi masalah karena hampir pasti sulit untuk memuaskan seluruh perbedaan keinginan dan selera rumah tangga. Sedangkan voucher tidak luput dari kelemahan yang sama. Jika voucher dimaksudkan sebagai alat untuk mendapatkan sejumlah barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka jenis intervensi ini akan menghadapi masalah yang sama dengan *inkind transfer*. Jika voucher disalurkan melalui jalur distribusi resmi, maka tidak menguntungkan bagi jalur distribusi

lain yang tidak ditunjuk oleh pemerintah (<http://www.isei.or.id/>).

Memang bantuan langsung tunai bukan lah satu-satunya strategi intervensi pengentasan kemiskinan karena cenderung menciptakan ketergantungan kepada bantuan pemerintah namun dalam jangka pendek bentuk intervensi ini meningkatkan pengeluaran rumah tangga sasaran. Bagi masyarakat miskin pada saat pemerintah menaikkan harga dasar BBM, kenaikan harga dapat mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin dapat mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun, karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Warga masyarakat miskin akan terkena dampak sosial semakin menurun taraf kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin. Dengan demikian BLT di perlukan sebagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi (*compensatory program*) yang sifatnya khusus (*crash program*) atau program jaring pengaman sosial (Depsos, 2008).

Apabila dilihat dari ketepatan sasaran penerima program BLT maka yang paling tepat menerima program BLT adalah masyarakat dengan kategori sangat miskin karena sifat program BLT adalah bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian atau kewajiban negara terhadap warga untuk pemenuhan hak-hak dasarnya. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Sedangkan masyarakat dengan kategori miskin dan hampir lebih cocok untuk diberdayakan karena sebenarnya mereka masih mempunyai potensi untuk dikembangkan akan tetapi karena kurangnya pengetahuan, akses terhadap informasi, ketiadaan modal dan kesempatan berusaha sehingga mereka jatuh miskin.

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi warga masyarakat guna meningkatkan keterampilan mereka dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempunyai dampak kehidupan dimasa depan (Ife, 2002). Namun untuk melakukan pemberdayaan sangat diperlukan peranan pendamping. Pendamping membantu

masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah mereka agar lebih efektif.

Apabila dilihat dari penyediaan data kemiskinan di Indonesia, database penerima BLT ini bisa dijadikan acuan untuk penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun lokal di tiap kelurahan/desa. Namun untuk penggunaan database ini diperlukan verifikasi data tersebut di lapangan sehingga program-program tersebut tepat sasaran dan tidak ada tumpang tindih berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kategorisasi rumah tangga sasaran berdasarkan kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin semestinya tersedia di kelurahan dan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud transparansi informasi dan memudahkan untuk menentukan strategi intervensi dari pengentasan kemiskinan. Karena pada setiap kategori kemiskinan tersebut memerlukan strategi yang berbeda, misalnya untuk kategori sangat miskin memang agak sulit untuk menerapkan strategi pemberdayaan sedangkan untuk kategori miskin dan hampir miskin justru tidak mendidik untuk menerapkan strategi bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan mereka.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Sebagian besar penerima Program BLT adalah masyarakat dengan kategori miskin 2). Kelurahan Pancoran Mas merupakan kantong kemiskinan di Kecamatan Pancoran Mas kota Depok karena Kelurahan ini merupakan penerima Program BLT terbanyak dan penerima Program BLT dengan kategori sangat miskin terbanyak di kelurahan ini. 3) Bagi masyarakat dengan kategori sangat miskin, program BLT bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sedangkan untuk masyarakat dengan kategori miskin dan hampir miskin Program BLT merupakan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kompensasi terhadap kenaikan harga BBM. Oleh karena program BLT tepat sasaran apabila diberikan

kepada rumah tangga sasaran dengan kategori sangat miskin.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian mengenai sebaran penerima dan Manfaat BLT bagi masyarakat miskin di Kecamatan Pancoran Mas maka kajian ini merekomendasikan :

- 1). Pada penentuan prioritas wilayah program penanggulangan kemiskinan dikecamatan Pancoran harus memperhatikan sebaran penerima BLT di tiap kelurahan yang merepresentasikan sebaran rumah tangga miskin.
- 2). Kelurahan Pancoran Mas selain merupakan kelurahan terpadat juga merupakan kelurahan yang paling banyak penerima BLT. Berdasarkan kategori kemiskinan juga kelurahan Pancoran Mas merupakan paling banyak penerima BLT dengan kategori sangat miskin sehingga untuk program penanggulangan kemiskinan semestinya diprioritaskan pada kelurahan Pancoran Mas.
- 3). Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga semestinya mengacu kategorisasi kemiskinan; sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Untuk kategori sangat miskin maka program bantuan sosial seperti program BLT memang diperlukan akan tetapi untuk kategori miskin dan hampir miskin program yang paling tepat adalah program pemberdayaan masyarakat dan untuk program pemberdayaan masyarakat ini peran pendamping sangat penting sehingga diperlukan pendampingan bagi tiap-tiap program pendampingan.
- 4). Data penduduk miskin berdasarkan kategorisasi kemiskinan tersebut semestinya tersedia di tingkat kelurahan dan dapat diakses dengan mudah bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
- 5). Berbagai program penanggulangan kemiskinan semestinya diperlukan persiapan yang mantap, mekanisme kerja dan sumber daya manusia yang handal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008. *Depok dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Depok, Depok, 2008. *Pancoran Mas dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Depok, Depok
2005. *Social Transfers and Chronic Poverty: Emerging Evidence and The Challenge Ahead*, London
- Departemen Sosial RI, 2008. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran*, Jakarta
-, 2008. *Database penerima BLT by name by address*, tidak dipublikasikan.
- <http://isei.or.id/page.php?id=5des065> diakses tanggal 22 September 2009
- http://kfm.depsos.go.id/mod.php?mod=userpage&page_id=6 diakses tanggal 22 September 2009
- http://www.setneg.go.id/Capaian_Program_BLT_Raskin,_BOS,_Jamkesmas_dan_PKH_Tahun_2008_dan_Awal_Tahun_2009.htm diakses tanggal 30 November 2009
- http://www.vivanews.com/bpkp_tidak_ada_penyimpangan_bantuan_tunai_files/jquery-1.js diakses tanggal 22 September 2009
- Ife, Jim. 2002. *Community Development*. Second Edition. Pearson Education Australia Pty Ltd, Sidney
- SMERU, 2006. *Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di DKI Jakarta dan Lima Kabupaten/Kota Lainnya*, SMERU, Jakarta
- Siswanti, Wahyu. *Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Studi Kasus di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume 12 No 1 (Mei 2008) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Suharto,Edi. 2004. *Jaminan Sosial (Isu-isu tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi)*, Balatbangsos, Jakarta

Suharto,Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung

Biodata Penulis :

Habibullah, Peneliti Pertama pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI dengan kepakaran Kebijakan Sosial, alumnus Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (D/H Ilmu Sosiatri) Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (tahun 2003) sempat bekerja pada Program *Habitat and Resources Management for the Kubu* (kerjasama KKI-Warsi dengan NORAD Norwegia, tahun 2003-2005) dan PT. Phapros, Tbk (tahun 2005-2006). Saat ini sedang mengikuti pendidikan pada Program Pasca Sarjana (S2) Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia dengan Peminatan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

Email:habibullah792002@yahoo.com